



2019 Pemilu Paling Rumit

Rekomendasi Jaringan Demokrasi Indonesia

YOGYA, TRIBUN - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY melakukan pengamatan terkait proses pemungutan suara pada Pemilu 2019 dan membuat beberapa rekomendasi. Ketua Presidium JaDI DIY, Mohammad Najib mengatakan, Pemilu 2019 merupakan pemilu paling rumit.

"Menggabungkan pemilihan (legislatif) dengan pemilihan presiden (pilpres) ini memungkinkan munculnya banyak masalah, karena jumlah penduduk bertambah dan kompleksitas bertambah," ujarnya, ketika memberikan keterangan pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Selasa (7/5).

Padahal, lanjut Najib, ke depan Pemilu tidak hanya ada tambahan pilpres tapi akan digabungkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini ditegaskannya perlu ditinjau ulang,



Sebenarnya masalah A5 bukan hanya kurang surat suara, tapi juga tata kelola.

Mohammad Najib
Ketua Presidium JaDI DIY

mengingat banyaknya masalah di lapangan hingga ratusan petugas yang meninggal saat Pemilu 2019.

"Kalau belajar dari pemilu zaman dulu, pada saat orde baru pemilihnya yang banyak meninggal karena kekerasan. Sampai saat ini belum ada yang meninggal dari aspek pendukung calon. Tapi dari penyelenggara yang jumlahnya banyak. Ini juga jadi pertimbangan bagi penyusun regulasi," urai Najib.

Najib menambahkan terdapat fenomena umum yang terjadi di beberapa daerah, tak terkecuali di Kota Yogyakarta dalam hal ini A5. Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan keleluasaan untuk mengurus pindah pilih. Namun keleluasaan itu tidak berlaku untuk KPU terkait penambahan pencetakan surat suara.

"Kurang terantisipasi di

surat suara. Apalagi Yogyakarta ini lebih banyak yang pindah pilih ke Yogya ketimbang yang keluar kota. Sebenarnya masalah A5 bukan hanya kurang surat suara, tapi juga tata kelola," ungkapnya.

Selanjutnya, mengenai banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang di Kota Yogyakarta terdapat di 4 titik, menunjukkan bukti bahwa pemungutan suara yang berjalan tidak sesuai dengan aturan main.

"Maka Bawaslu merekomendasikan PSU. Koreksi itu memang dimungkinkan, tapi membuat tidak efisien. Tidak hanya petugas yang repot, tapi juga pemilih. PSU ini tren partisipasi rendah karena warga kota sudah tidak di kota jarena kerja di luar. Pemborosan juga untuk surat suara dan logistik lain serta harus bikin TPS baru lagi," beber Najib.

Ia menambahkan adanya perbedaan pemahaman di level KPPS bahkan penyelenggara pemilu, belum tuntas. Ini yang membuat Pemilu mengalami beberapa persoalan. "PSU itu adalah bukti. Kalau penyelenggara belum memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Anggota Presidium JaDI DIY, Guno Tri Tjahjoko menjelaskan, berdasarkan pengamatannya di sekitar kampus terdapat beberapa faktor yang membuat mahasiswa memilih untuk golput.

"Pertama yakni terkait administrasi. Tidak bisa memilih pada hari H karena surat suara tidak ada. Dipaksa oleh sistem untuk ke TPS lain yang jauh dari domisili. Misal di Depok ada sekitar 400-an yang akhirnya dilakukan PSU," ucapnya.

Selain itu, para pemilih dari kalangan mahasiswa juga disebut Guno kurang puas dengan dua pilihan calon presiden sehingga akhirnya memutuskan untuk golput. "Alasan golput lain yakni sakit dan tidak memungkinkan melakukan mobilitas ke TPS dan tugas ke luar daerah dan belum sempat mengurus A5," ujar Guno. (kur)

KPR Kolan yk
Netral
Berita
Untuk di Kotaku

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Yog

PSU Bukan Kesalahan Bawaslu

KETUA Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto, belum lama ini memberikan keterangan melalui rilis terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ia mengatakan bahwa tujuan dari Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah mewujudkan Pemilu yang damai dan berintegritas.

"Bawaslu Kota Yogyakarta menempatkan 1.373 pengawas TPS yang tersebar di 1.373 TPS se-Kota Yogyakarta. Untuk membekali kemampuan pengawas TPS saat bertugas, Bawaslu memberikan bimbingan teknis sebanyak dua kali yang dilaksanakan oleh Panwaslucam," jelasnya.

Pada masing-masing Panwaslucam, Agus menjelaskan bahwa telah melakukan bimbingan teknis antara 4-6 kali termasuk dengan metode forum diskusi. Lantas, Agus menjelaskan kronologis kejadian di TPS 16

Gowongan Jetis yang mengakibatkan diberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU.

"Pada saat pukul 12.00 pengawas TPS berkeliling bersama anggota KPPS dan saksi. Lalu datang 2 orang yang berasal dari Semarang dan Jakarta Barat ingin menggunakan hak pilih di TPS dengan menggunakan KTP tanpa A5 atau C6. KPPS 1 memutuskan memberikan hak pilih kepada keduanya masing-masing surat suara calon presiden," bebernya.

Ia pun meluruskan, informasi yang beredar di media daring terkait adanya jajaran pengawas yang menelepon KPPS dan meminta untuk memberikan hak pilih kepada dua orang tersebut adalah tidak benar dan terbantahkan. "Keputusan Panwaslucam Jetis untuk mengeluarkan rekomendasi adalah sudah tepat. Keterangan ini dilengkapi dengan alat bukti yang kuat dan dapat diklarifikasi," pungkas Agus. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005